Jurnal Wacana Kinerja
Volume 29 | Nomor 2 | November 2026
DOI: 10.31845/jwk.v29i2.1045
p-issn: 1411-4917; e-issn: 2620-9063
http://jwk.lan.go.id

Pendekatan DPSIR dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Penelitian di Kabupaten Banyuwangi

DPSIR Approach in Research-Based Tourism Sector Development in Banyuwangi Regency

Yusuf Hariyoko[1], Bintoro Wardiyanto[2], Falih Suaedi[3], Ardhi Kurniawan[4], Ronny Ersya Novianto Putra[5], dan Muhammad Iqbal Humam[6]

[1] *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*
Jalan Semolowaru, No. 45, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Telp. dan Fax. 031-5931800

[2,3] *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga,*
Kampus B UNAIR, Jalan Airlangga 4-6, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Telp. dan Fax. 031-5034015

[4,5] *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi*
Jalan Telaga Warna, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Telp. dan Fax. 0341-565500

[6] *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*
Jalan Telaga Warna, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Telp. dan Fax. 0341-553737

(Diterima 11/01/26; Direvisi 23/07/26; Disetujui 14/08/26)

Abstract

Tourism is a sector that drives economic growth, creates jobs, and strengthens a region's image. In destinations like Banyuwangi Regency, policy focus has shifted from increasing visitor numbers to strengthening governance to ensure economic benefits do not come at the expense of environmental, cultural, and social quality. This study aims to analyze Banyuwangi's tourism development dynamics through the Driver–Pressure–State–Impact–Response (DPSIR) framework to examine causal relationships and inform the RIPJPID, given the limited research integrating DPSIR to link research findings with sustainable tourism policy formulation. This study used a qualitative approach with document analysis of secondary data from local government documents and Statistics Indonesia (BPS) data. Findings indicate that drivers, including promotional events, investment, accommodation, and shifting tourist preferences, trigger pressures such as overcrowding, traffic congestion, waste, energy consumption, ecosystem strain, and burdens on public facilities. In the state dimension, gaps were identified in the research and innovation ecosystem, in man-made and cultural tourism. Impacts are twofold: economic benefits alongside risks such as inequality, spatial conflicts, environmental degradation, declining visitor experience, and safety hazards. Recommended responses include carrying-capacity management, zoning, strengthened waste-management governance, transportation integration, CBT, and indicator-based monitoring to ensure research supports measurable and sustainable policies.

Keywords: *DPSIR, RIPJPID, tourism, Banyuwangi, innovation research.*

[1] Email: yusuf.hariyoko-2021@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Pariwisata merupakan sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan citra daerah. Pada destinasi yang telah matang seperti Banyuwangi, isu kebijakan bergeser dari peningkatan kunjungan menuju penguatan tata kelola agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan kualitas lingkungan, budaya, dan kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pengembangan pariwisata Banyuwangi menggunakan kerangka *Driver–Pressure–State–Impact–Response* (DPSIR) sebagai dasar pembacaan kausalitas serta penajaman kebutuhan kebijakan dalam RIPJPID, mengingat masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan kerangka DPSIR untuk menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan perumusan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen terhadap data sekunder dari dokumen resmi pemerintah daerah dan statistik Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *drivers* berupa promosi dan *event*, investasi, akomodasi, serta perubahan preferensi wisatawan memicu *pressures* berupa *overcrowding*, kemacetan, sampah, konsumsi energi, tekanan ekosistem, dan beban fasilitas publik. Pada dimensi *state*, ditemukan kesenjangan ekosistem riset dan inovasi, terutama pada pariwisata buatan dan budaya. *Impacts* bersifat ganda berupa manfaat ekonomi yang beriringan dengan risiko ketimpangan, konflik ruang, degradasi lingkungan, penurunan pengalaman, dan risiko keselamatan. Rekomendasi *responses* meliputi pengaturan daya dukung, zonasi, penguatan tata kelola persampahan, integrasi transportasi, CBT, serta pemantauan berbasis indikator agar penelitian menjadi dasar kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Kata Kunci: DPSIR, RIPJPID, pariwisata, riset inovasi, Banyuwangi.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata semakin diakui sebagai sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat citra daerah (Nurizwan & Dewi, 2018). Pariwisata yang dikelola dengan baik dan didukung dengan kebijakan strategis pemerintah akan mendorong berkembangnya pariwisata yang berkelanjutan. Di daerah yang sudah memiliki pariwisata yang maju, isu kebijakannya akan bergeser dari sekadar meningkatkan kunjungan wisatawan menjadi isu pengelolaan keberhasilan agar memberikan dampak ekonomi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat (Soekarya, 2011).

Sinergi yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata tersebut berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata yang sudah maju. Kebijakan yang dibuat ke depan perlu memberikan kejelasan peran dan manfaat dari setiap aktor yang ada dengan pendekatan *pentahelix* (Girindra, 2020). Konsep *pentahelix* dalam pengembangan pariwisata juga perlu ditinjau ulang agar aktivitas yang dilakukan tidak bersifat repetitif, tetapi lebih inovatif (Vani *et al*., 2020). Konsep tersebut diterapkan melalui pelibatan pemerintah dan media massa dalam mempublikasikan pemberitaan yang bersifat mutualistik untuk menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara (Hentika & Agustina, 2024).

Pemanfaatan hasil penelitian oleh aktor akademik perlu dioptimalkan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan pariwisata. *Driver-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR) *framework* berusaha menjabarkan faktor pendorong tertentu melalui pendekatan korelasional yang menekankan hubungan sebab-akibat (Quevedo *et al*., 2023). DPSIR ini akan cukup memberikan gambaran tentang implementasi di lapangan serta pihak yang berwenang untuk melaksanakan hasil penelitian tersebut.

Akademisi juga memiliki peran yang signifikan dalam proses pengembangan wisata. Ranah akademis yang menekankan pengembangan konsep baru dan pemanfaatannya di masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan wisata. Penerapan peran tersebut di Indonesia perlu diperkuat dan dikoordinasikan oleh pemerintah dalam kerangka riset daerah (Resen, 2015). Pada ranah pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan, adanya Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah telah memberikan panduan dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) (Parastowo, 2025).

Peran setiap aktor yang dapat dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih besar (Wiraguna, 2024). Adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah dengan disinergikan dengan dokumen perencanaan yang lain. Muatan lokal yang mendorong inovasi dan kolaborasi merupakan salah satu hal yang harus ada dan dimanfaatkan (Azizah *et al*., 2022; Muzaqi *et al*., 2024). RIPJPID dibutuhkan untuk memastikan program pembangunan daerah didukung oleh *evidence-based policy* melalui riset yang terarah dan inovasi yang dapat diimplementasikan. Manfaat yang dapat diambil dengan adanya RIPJPID, di antaranya untuk memetakan dan mengembangkan: (a) potensi unggulan dan isu strategis daerah, (b) kondisi ekosistem riset dan inovasi, (c) *gap* data dan kebutuhan bukti kebijakan, serta (d) *roadmap* riset-inovasi yang sinkron dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RPD, RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah).

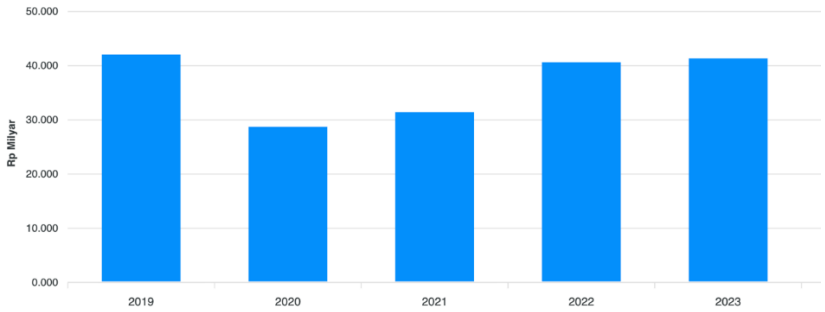
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang berhasil dalam membangun sektor pariwisata dan telah berada pada level lanjut dalam pengembangannya. Peningkatan level tersebut dicapai melalui proses yang cukup lama dan usaha yang besar. Setelah masa pandemi, sektor pariwisata terus berusaha untuk bangkit lagi dan dapat berkembang ke arah yang lebih baik seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024

Tahun	Rata-rata Kunjungan Wisatawan
2019	4.315.996
2020	4.530.937
2021	4.084.301
2022	3.693.420
2023	3.296.365
2024	3.405.145

Sumber: Kabupaten Banyuwangi, n.d.-b

Sejalan dengan data pada Tabel 1, kontribusi sektor pariwisata telah berhasil mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dampak ekonominya terhadap masyarakat. Kontribusi terhadap PAD sekitar 30-40 miliar rupiah per tahun, seperti yang tertera pada Gambar 1. Kontribusi tersebut dapat digunakan secara langsung oleh pemerintah daerah sesuai dengan arah pembangunan daerah yang berfokus pada sektor pariwisata.



Gambar 1. Kontribusi Sektor Pariwisata pada PAD Kabupaten Banyuwangi
Sumber: Kabupaten Banyuwangi, n.d.-a

Kabupaten Banyuwangi dikenal konsisten membangun pariwisata melalui penguatan atraksi, *event*, promosi, dan kolaborasi lintas aktor, yaitu antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha. Keberadaan *event* berskala besar dan portofolio destinasi alam dan budaya menjadikan Banyuwangi sebagai contoh daerah yang memasuki fase pariwisata matang (*mature destination*), yaitu ketika permintaan wisata stabil atau tinggi dan tata kelola destinasi menjadi isu utama. Pada destinasi maju, aset strategis (alam, budaya, *geoheritage*) menjadi "nilai jual utama" sekaligus sumber kerentanan apabila tidak dikelola berbasis daya dukung (Liang *et al*., 2023).

Masalah yang muncul ke depan adalah daya dukung (*carrying capacity*) dan kepadatan pengunjung di titik-titik destinasi yang populer memberikan tekanan terhadap ekologi, menimbulkan kemacetan dan antrean, serta menurunkan kualitas pengalaman wisatawan (Kastenholz *et al*., 2018). Tata kelola arus kunjungan (*visitor governance*) juga perlu diperhatikan melalui penguatan pemahaman terkait manajemen kerumunan, integrasi transportasi, dan penataan akses. Hal yang penting lainnya adalah terkait keselamatan wisata dan manajemen risiko (Lidiawaty *et al*., 2024).

Meskipun berbagai program pengembangan pariwisata telah berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan *event*, promosi destinasi, dan penguatan pemasaran, sebagian besar intervensi masih berorientasi pada pencapaian *output* kegiatan (*activity-based approach*) dibandingkan dengan pengelolaan destinasi secara menyeluruh. Evaluasi program umumnya masih terbatas pada indikator keberhasilan jangka pendek, seperti jumlah kunjungan wisatawan, tanpa didukung bukti empiris yang mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara faktor pendorong (*drivers*), tekanan (*pressures*), kondisi aktual destinasi (*state*), dampak (*impacts*), dan respons kebijakan (*responses*). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa penelitian pariwisata masih belum banyak mengadopsi kerangka DPSIR sebagai kerangka analisis yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam satu sistem yang utuh. DPSIR memungkinkan identifikasi hubungan kausal antara pertumbuhan sektor pariwisata dan munculnya berbagai tekanan terhadap destinasi, perubahan kondisi kawasan, serta konsekuensi yang ditimbulkan bagi masyarakat, lingkungan, dan daya saing daerah. Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah dengan tingkat perkembangan pariwisata yang relatif maju, kesenjangan tersebut menjadi semakin penting untuk diatasi. RIPJPID tidak lagi cukup berorientasi pada peningkatan aktivitas pengembangan pariwisata, tetapi perlu mengarahkan riset dan inovasi pada penguatan tata kelola destinasi yang berkelanjutan berbasis kerangka DPSIR. Dengan demikian, riset tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, melainkan juga sebagai penyedia *evidence* yang menjelaskan keterkaitan antara *drivers, pressures, state, impacts*, dan *responses* sehingga dapat digunakan untuk menetapkan daya dukung destinasi, mengevaluasi dampak terhadap *length of stay, tourist spending*, kepuasan wisatawan, kualitas lingkungan, dan risiko sosial-ekologis, sekaligus menjadi dasar

penyusunan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Posisi inilah yang masih belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu, sehingga menjadi celah penelitian yang relevan untuk diisi melalui studi ini, yaitu pengembangan RIPJPID berbasis DPSIR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan pariwisata berbasis penerapan penelitian di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan pendekatan DPSIR. Permasalahan penelitian berfokus pada belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan pariwisata serta belum terintegrasinya faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respons kebijakan ke dalam perumusan kebijakan pariwisata daerah. Pendekatan tersebut akan memetakan kebijakan dari setiap perangkat daerah. Hasil analisis selanjutnya diarahkan untuk merumuskan rekomendasi riset dan inovasi yang dapat diintegrasikan ke dalam RIPJPID sebagai dasar penguatan kebijakan pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1 *Governance*

Perubahan lingkungan strategis, globalisasi, kemajuan teknologi, serta peningkatan kompleksitas persoalan publik telah mendorong pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance*. Paradigma *government* yang menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan urusan publik dinilai semakin sulit untuk menjawab tantangan pembangunan yang multidimensional dan melibatkan banyak kepentingan. Berbagai persoalan seperti kemiskinan, pembangunan desa, perubahan iklim, ketahanan pangan, transformasi digital, dan ketimpangan sosial tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan birokrasi yang bersifat hierarkis dan *top-down* (Alketbi & Gardiner, 2014; Breuer *et al*., 2014). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, informasi, kewenangan, maupun kemampuan untuk menjangkau seluruh aktor yang terlibat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan pendekatan tata kelola yang lebih terbuka, adaptif, dan mampu mengintegrasikan kontribusi berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah publik (Freeman & McVea, 2001).

Paradigma *governance* memandang bahwa penyelenggaraan urusan publik tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif pemerintah, melainkan merupakan hasil interaksi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas lokal, akademisi, dan berbagai aktor lainnya yang saling bergantung (Grote, 2024; Woodly, 2008). Dalam perspektif ini, pemerintah tetap memiliki peran penting sebagai pemegang otoritas publik, tetapi fungsinya bergeser dari pelaksana utama (*provider*) menjadi fasilitator, koordinator, mediator, sekaligus pengarah (*steering*) dalam proses kolaborasi. Pergeseran tersebut juga ditandai oleh perubahan pola hubungan antaraktor dari struktur yang bersifat hierarkis menuju jaringan (*network*) yang mengedepankan koordinasi, negosiasi, kemitraan, dan pembagian sumber daya. Rhodes (1996) menjelaskan bahwa *governance* merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung melalui jejaring organisasi yang saling bergantung (*interorganizational networks*), sedangkan Stoker (1998) menegaskan bahwa *governance* dicirikan oleh keterlibatan berbagai institusi dan aktor yang melampaui batas-batas formal pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik.

2.2 Pengembangan Pariwisata berbasis Riset

Riset pariwisata merupakan bidang kajian multidisipliner yang mempelajari pergerakan wisatawan, pengalaman perjalanan, serta dampak dan tata kelola destinasi dalam konteks ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Pariwisata umumnya dipahami bukan sekadar aktivitas rekreasi, melainkan sebuah sistem yang melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan wisatawan yang berinteraksi melalui produk, layanan, dan ruang destinasi (McKercher & Tkaczynski, 2024). Bidang kajian penelitian pariwisata berkembang dari studi deskriptif tentang kunjungan dan atraksi menjadi analisis yang lebih mendalam mengenai perilaku, nilai (*value*), relasi kekuasaan, serta keberlanjutan destinasi.

Kajian literatur pariwisata dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti riset permintaan dan perilaku wisatawan yang mencakup motivasi, persepsi risiko, kepuasan, loyalitas, dan pengambilan keputusan (Goktepe *et al*., 2024). Kategori pertama adalah riset destinasi dan tata kelola yang terdiri dari *destination management*, kolaborasi multiaktor, kebijakan, regulasi, dan kapasitas institusi. Selanjutnya adalah kategori riset dampak pariwisata yang mencakup dampak ekonomi (*multiplier effect*, tenaga kerja, UMKM), sosial-budaya (komodifikasi budaya, perubahan komunitas), serta lingkungan (tekanan daya dukung, emisi, degradasi). Selanjutnya, terdapat kategori riset daya saing dan inovasi yang mencakup pengembangan produk, *place branding*, *event tourism*, dan ekonomi kreatif yang menekankan bagaimana destinasi membangun diferensiasi dan nilai tambah.

Meskipun penelitian pariwisata telah berkembang dengan memanfaatkan beragam pendekatan metodologis, baik kuantitatif melalui survei, pemodelan kepuasan dan loyalitas, analisis permintaan, maupun kualitatif melalui studi kasus, etnografi, wawancara mendalam, analisis wacana, serta desain campuran, sebagian besar penelitian masih berfokus pada menghasilkan temuan akademik atau menjelaskan fenomena pariwisata. Penelitian tersebut belum banyak diarahkan pada bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi dasar penyusunan kebijakan, strategi pengembangan destinasi, maupun pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Padahal, literatur mutakhir telah mendorong penggunaan perspektif sistem dan sosial-ekologis melalui pengukuran keberlanjutan, analisis jaringan kolaborasi, serta penilaian daya dukung destinasi sebagai landasan pengembangan pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan (Supriyanto & Fitria, 2022). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara produksi pengetahuan dalam penelitian pariwisata dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar dalam upaya mewujudkan *evidence-based policy* serta dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata.

Sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat pemanfaatan hasil riset tersebut, arah perkembangan riset pariwisata semakin menekankan isu-isu strategis seperti pariwisata berkelanjutan, ketahanan destinasi terhadap krisis, bencana, pandemi, volatilitas ekonomi, digitalisasi melalui media sosial, *review online*, *smart tourism*, serta inklusivitas *benefit sharing*, kerja layak, dan partisipasi komunitas (Suprojo & Siswanto, 2017). Dampaknya, pariwisata menjadi ranah kajian yang sering ditinjau dari berbagai aspek, dengan mengaitkan temuan empiris dengan implikasi kebijakan, desain intervensi untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata, memperkuat tata kelola kolaboratif, mengurangi kebocoran ekonomi, serta menjaga daya dukung lingkungan.

Dalam perspektif *governance*, pengembangan pariwisata tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tanggung jawab pemerintah, melainkan sebagai proses pengelolaan destinasi yang melibatkan interaksi dan sinergi berbagai aktor untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perspektif tersebut kemudian menempatkan pengembangan pariwisata berbasis riset sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya bukti empiris dalam memahami permasalahan destinasi, merumuskan respons kebijakan, serta

mengarahkan kolaborasi antaraktor secara lebih tepat. Dalam konteks tersebut, DPSIR (*Driver–Pressure–State–Impact–Response*) digunakan sebagai alat analisis untuk memetakan secara sistematis faktor pendorong, tekanan, perubahan kondisi, dampak, dan respons dalam perkembangan destinasi, sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan riset sekaligus menyediakan bukti empiris bagi perumusan respons kebijakan pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.

2.3 *DPSIR Framework*

Kerangka DPSIR (*Driver–Pressure–State–Impact–Response*) adalah model konseptual untuk menjelaskan hubungan sebab–akibat antara aktivitas manusia, perubahan kondisi lingkungan/sistem, konsekuensi yang ditimbulkan, serta respons kebijakan yang dapat diambil. DPSIR digunakan untuk membantu peneliti dan pembuat kebijakan menyusun masalah secara runtut, dari akar penyebab hingga alternatif intervensi (Pradana *et al*., 2023). Dalam kajian pustaka, DPSIR berfungsi untuk memudahkan penelusuran teori, temuan empiris, dan indikator, sehingga analisis terhubung dengan tujuan perbaikan tata kelola.

Komponen DPSIR terdiri dari lima unsur yang saling berkesinambungan (Afedor *et al*., 2024). *Drivers* adalah faktor penggerak struktural (misalnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan ekonomi, pola konsumsi, atau kebijakan pembangunan) yang memicu perubahan (Gari *et al*., 2018). *Pressures* adalah tekanan langsung akibat *drivers*, seperti emisi, limbah, ekstraksi sumber daya, alih fungsi lahan, atau peningkatan beban layanan publik (Gnanapragasam *et al*., 2026). *State* menggambarkan kondisi aktual sistem yang terdampak, misalnya kualitas air dan udara, tutupan lahan, ketersediaan air, atau kondisi sosial-ekonomi yang relevan (Liu *et al*., 2022). *Impact* adalah dampak lanjutan terhadap kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, dan fungsi ekosistem (misalnya kenaikan risiko penyakit, kerugian ekonomi, penurunan produktivitas, atau meningkatnya kerentanan bencana) (Sampath *et al*., 2022). Terakhir, *Responses* adalah tindakan intervensi (regulasi, insentif, penegakan, inovasi layanan, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan) yang diarahkan untuk memutus rantai masalah pada satu atau beberapa komponen (Quevedo *et al*., 2023).

DPSIR dimanfaatkan untuk membingkai perumusan masalah dan pertanyaan riset secara kausal, sehingga variabel dan indikator dapat diturunkan dengan jelas untuk setiap komponen. DPSIR juga dapat membantu mengintegrasikan data lintas sektor—lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola—agar analisis tidak parsial (Wider *et al*., 2023). Kerangka tersebut efektif untuk menyusun peta pemangku kepentingan, yaitu memetakan siapa yang berkontribusi pada *drivers/pressures*, siapa yang paling terdampak oleh *impacts*, serta siapa yang berwenang merancang *responses*. DPSIR memudahkan peneliti menyusun alur rekomendasi yang operasional berupa intervensi jangka pendek (mitigasi *impact*), menengah (memulihkan *state*), dan jangka panjang (mengubah penyebab).

Penerapan DPSIR dalam konteks kinerja pemerintah akan membantu memperkuat tiga aktivitas, yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis bukti. DPSIR dapat mendukung perancangan program yang lebih tepat sasaran dan dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah karena setiap komponen menuntut peran berbeda, sehingga kinerja menjadi lebih terintegrasi (Norris, 2007). Pada akhirnya, DPSIR dapat meningkatkan akuntabilitas publik, efisiensi belanja, dan efektivitas layanan karena kebijakan disusun berdasarkan rantai kausal yang jelas dan dapat diuji melalui pemantauan serta evaluasi secara berkala.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen atau studi kepustakaan. Fokus penelitian mengacu pada kerangka berpikir *Driver-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang diakses melalui situs web Satu Data Kabupaten Banyuwangi, RPJMD Kabupaten Banyuwangi periode 2025–2029, serta dokumen perencanaan strategis (Renstra) dari setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, berupa Renstra (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan Dinas Perhubungan). Selain itu, penelitian juga menggunakan data statistik yang disediakan oleh BPS Kabupaten Banyuwangi. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena memuat informasi yang relevan dengan dinamika pengembangan pariwisata dan komponen DPSIR.

Analisis data dilakukan secara sistematis sesuai dengan pendekatan Creswell & Creswell (2018) dengan tahapan: mengelola data yang diperoleh dari RIPJPID, RPJMD 2025-2029, Renstra Disbudpar 2025-2029, Renstra DLH 2025-2029, Renstra Bappeda 2025-2029, Renstra BPBD 2025-2029, LKjIP Bappeda, dan LKjIP Disbudpar; mengorganisasi data mentah yang relevan sesuai dengan tema penelitian; membaca dan memahami data dengan mengategorisasikan data tersebut sesuai dengan fokus DPSIR; mengembangkan deskripsi dan tema berdasarkan DPSIR sesuai dengan konteks penelitian; menyajikan data dalam laporan; dan menginterpretasikan data berdasarkan temuan dan konteks penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Driver*

Driver adalah faktor penggerak struktural, misalnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan ekonomi, pola konsumsi, atau kebijakan pembangunan yang memicu terjadinya perubahan (Pradana *et al*., 2023). Dalam konteks pariwisata, *driver* ini penting dijadikan sebagai pengantar kajian karena menjelaskan bahwa perkembangan pariwisata tidak muncul secara alami, melainkan merupakan konsekuensi dari dinamika makro yang membentuk permintaan, penawaran, dan pola mobilitas. Peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi cenderung meningkatkan kebutuhan rekreasi dan memperluas pasar wisata, sementara perubahan ekonomi dan pola konsumsi mendorong diversifikasi preferensi wisatawan.

Kebijakan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, penetapan kawasan strategis, atau insentif investasi dapat mempercepat pertumbuhan destinasi, namun juga berpotensi memunculkan tekanan baru pada ruang, lingkungan, serta struktur sosial-ekonomi lokal (Hariyoko, Soesiantoro, *et al*., 2021). *Driver* sebagai titik awal analisis membantu agar kajian pariwisata tidak hanya membahas atraksi dan kunjungan, tetapi juga menelusuri proses perubahan, potensi masalah yang menyertainya, serta kebutuhan tata kelola destinasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, salah satu faktor penggerak yang dapat diamati adalah kebijakan dan investasi pemerintah daerah dalam mendorong promosi pariwisata. Komitmen tersebut antara lain tercermin dari alokasi anggaran promosi yang digunakan untuk memperluas pemasaran destinasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Anggaran promosi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami kenaikan setiap tahun. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2,

terdapat tren kenaikan anggaran dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Hasil dari pemanfaatan anggaran tersebut juga memiliki hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 yang memperlihatkan tren kenaikan PAD pada periode yang sama.

Tabel 2. Jumlah Anggaran Promosi Kabupaten Banyuwangi per Tahun

Tahun	Anggaran Promosi
2024	Rp 2.065.257.450
2023	Rp 2.371.909.500
2022	Rp 1.735.010.200
2021	Rp 1.995.245.100

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut, hal ini juga terlihat dari tingkat keterisian kamar penginapan (*occupancy rate/OR*). OR tersebut digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan pada aktivitas pariwisata. Sejalan dengan kondisi tersebut, OR perlu menjadi perhatian penting dalam penyusunan strategi pengembangan pariwisata. Hal ini sebagaimana terlihat pada Tabel 3 yang memperlihatkan bahwa terdapat beberapa musim yang ramai pengunjung dan ada yang sepi, sesuai dengan kondisi dan musim yang dapat dipetakan sebagai *driver*.

Tabel 3. Data Tingkat Keterisian Penginapan Kabupaten Banyuwangi

Bulan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	42,21	51,1	38,53	38,9	46,74	49,81
Februari	38,84	47,85	37,7	41,94	46,72	53,34
Maret	43,12	33,88	39,85	47,53	38,2	38,18
April	42,35	13,22	37,27	44,81	33,86	
Mei	25,32	12,36	37,2	61,01	44,42	
Juni	51,23	29,12	52,21	52,56	65,34	
Juli	52,95	30,73	35,6	57,68	60,33	
Agustus	49,61	44,58	35,04	49,94	57,66	
September	40,14	40,14	42,79	53,33	55,71	
Oktober	52,77	47,88	58,11	56,73	60,39	
November	57,48	53,26	49,57	55,85	53,68	
Desember	59,79	56,7	64,63	62,92	67,95	

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi, 2024

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi penginapan merupakan *driver* yang menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi pariwisata. Namun, pertumbuhan tersebut juga memunculkan berbagai tekanan, terutama meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur pendukung, akomodasi, dan konektivitas antardestinasi. Pergeseran preferensi wisatawan ke arah perjalanan berdurasi lebih singkat (*short stay tourism*) dengan harapan memperoleh pengalaman wisata yang maksimal semakin meningkatkan kebutuhan terhadap efisiensi mobilitas. Sebagian besar destinasi unggulan di Kabupaten Banyuwangi memiliki jarak tempuh yang relatif jauh, dengan waktu perjalanan antardestinasi rata-rata sekitar satu jam. Kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi

perjalanan wisata, membatasi jumlah destinasi yang dapat dikunjungi, serta memengaruhi keputusan wisatawan untuk memperpanjang masa tinggal.

Tekanan tersebut tercermin pada kondisi sistem pariwisata Banyuwangi, yaitu belum optimalnya pemerataan fasilitas akomodasi dan konektivitas di kawasan wisata strategis. Meskipun tingkat okupansi hotel menunjukkan tren positif, distribusi penginapan dan aksesibilitas antardestinasi masih menjadi tantangan dalam mendukung pola perjalanan wisata yang lebih efektif. Promosi dan event tampak menjadi pendorong strategis yang berjalan seiring dengan pemulihan kinerja okupansi dan penguatan PAD, tetapi hubungan tersebut belum dapat dinyatakan kausal tanpa analisis lebih lanjut yang mengontrol faktor musiman, kapasitas akomodasi yang bertambah, serta perbedaan karakter permintaan per bulan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengubah promosi dari sekadar belanja kegiatan menjadi pengukuran ROI promosi yang mengaitkan *output* promosi dengan *outcome* yang terukur, seperti OR, lama tinggal, belanja wisata, dan PAD per segmen pasar serta per musim. Strategi tersebut dapat diarahkan pada pemanfaatan bulan/momen *low/shoulder season* melalui kampanye tematik dan *bundling* produk. Selain itu, perlu dilakukan penguatan promosi digital berbasis data melalui kolaborasi dengan pelaku akomodasi/transportasi untuk paket kunjungan.

4.2 *Pressure*

Pressure adalah tekanan langsung akibat *driver*, seperti emisi, limbah, ekstraksi sumber daya, alih fungsi lahan, atau peningkatan beban layanan publik. Dalam konteks pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang relatif maju dan agresif, (Haryanto *et al*., 2025) hal tersebut mendorong pertumbuhan destinasi serta konsep *event*. *Pressure* menjadi pengantar penting untuk menegaskan urgensi riset karena keberhasilan menarik wisatawan dan investasi hampir selalu diikuti oleh kenaikan tekanan ekologis dan sosial yang tidak selalu terlihat pada awal pertumbuhan.

Aspek tekanan langsung berupa peningkatan mobilitas menuju kawasan wisata dapat memicu kemacetan dan emisi. Sementara itu, pertumbuhan akomodasi dan kuliner meningkatkan konsumsi air, energi, serta produksi sampah. Ekspansi ruang pariwisata juga berpotensi mendorong alih fungsi lahan di koridor destinasi (Hariyanto, 2023). Pada saat yang sama, lonjakan kunjungan wisatawan dan aktivitas *event* dapat menambah beban layanan publik mulai dari kebutuhan sanitasi, penyediaan area parkir, keselamatan, kapasitas pengelolaan destinasi, hingga pengelolaan kebersihan objek wisata (Saraswati, 2022). Kebutuhan akan desain tata kelola yang lebih adaptif dan berbasis data melalui riset pariwisata di Banyuwangi menjadi krusial bukan hanya untuk mempertahankan daya tarik dan daya saing, tetapi juga untuk memastikan tekanan yang meningkat dapat dikelola melalui kebijakan yang tepat, pembagian manfaat yang lebih adil, serta perlindungan daya dukung lingkungan agar keberlanjutan destinasi tetap terjaga.

Lonjakan kunjungan wisata dan kepadatan aktivitas pada periode puncak menjadi bentuk *pressure* paling nyata di Banyuwangi, terutama pada destinasi unggulan dan pada saat kalender *event*. Pada periode libur Nataru 2024-2025, terdapat sekitar 310 ribu kunjungan. Pada skala destinasi, Pantai Pulau Merah tercatat menerima 19.783 wisatawan dan mengalami *overcrowding* pada lokasi pantai yang akses, ruang publik, dan layanan kebersihannya terbatas. Di Kawah Ijen, pengelola mencatat kunjungan libur Natal sekitar 15.000 orang selama 10 hari, yang menggambarkan tekanan kerumunan yang berpotensi memicu antrean, kepadatan jalur *trekking*, kebisingan, serta beban fasilitas publik seperti toilet, parkir, pos layanan, dan keamanan (Humas KSDES, 2025).

Pressure berikutnya muncul akibat kemacetan, emisi, serta beban utilitas air dan energi yang meningkat seiring meningkatnya kepadatan kunjungan dan tingkat okupansi akomodasi sesuai dengan isu strategis yang diangkat dalam Renstra oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Bappeda Kabupaten Banyuwangi (Bappeda Kab Banyuwangi, 2025; Disbudpar Kab Banyuwangi, 2025). Beban lalu lintas menuju destinasi juga meningkat tajam di jalur menuju Ijen ketika arus kendaraan membludak di jalan yang sempit dan menanjak, bahkan memicu kendaraan mogok dan antrean panjang. Secara logis, hal tersebut meningkatkan emisi perjalanan serta menambah tekanan terhadap keselamatan dan layanan pengaturan lalu lintas. Tingkat okupansi dan arus wisata yang tinggi meningkatkan konsumsi air dan energi di hotel dan restoran. Tekanan utilitas perlu dipetakan berdasarkan destinasi dan musim untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang adaptif

Lebih spesifik terkait isu persampahan, anggaran yang dikeluarkan mengalami penurunan dari 16,5 M pada 2024 menjadi 13,1 M pada 2025. Sejalan dengan penurunan tersebut, kebutuhan pengelolaan persampahan juga meningkat dari 68% menjadi 70% (DLH Kab. Banyuwangi, 2026). Isu anggaran ini juga menjadi menarik di saat adanya timbulan sampah kiriman dari laut, tekanan terhadap ekosistem pesisir konservasi, serta gejala perubahan pemanfaatan lahan. Temuan Saraswati (2022) yang menunjukkan tren peningkatan sampah rata-rata 11,53% per tahun menguatkan bahwa pertumbuhan wisata berkorelasi dengan kenaikan beban persampahan, termasuk sampah wisata dan sampah kiriman laut. Pada kawasan konservasi seperti Ijen, tekanan kunjungan juga tercermin dari kebijakan penutupan sementara untuk evaluasi tahunan pasca periode ramai yang mengindikasikan bahwa pengelola perlu mengendalikan intensitas pemanfaatan kawasan (Humas KSDES, 2025).

4.3 *State*

Komponen *State* menggambarkan kondisi aktual sistem yang terdampak, misalnya kualitas air dan udara, tutupan lahan, ketersediaan air, atau kondisi sosial-ekonomi yang relevan. Kondisi pariwisata Kabupaten Banyuwangi saat ini menjadi pengantar penting untuk menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata perlu diimbangi dengan upaya memperhatikan kondisi lingkungan dan sosialnya, bukan hanya capaian jumlah kunjungan atau promosi. Ketika arus wisata meningkat, kondisi kebersihan pantai dan kawasan wisata, kualitas sanitasi, ketersediaan air bersih bagi warga dan pelaku usaha, hingga perubahan tutupan lahan pada koridor wisata dapat berubah secara bertahap dan sering kali tidak langsung terlihat tanpa pengukuran.

Tabel 4. Kualitas Lingkungan di Kabupaten Banyuwangi

Indikator ukuran	Nilai
Indeks Kualitas Air	60,16
Indeks Kualitas Udara	86,72
Indeks Kualitas Lahan	61,59

Sumber: DLH Kab. Banyuwangi, 2026

State mencakup kondisi sosial-ekonomi dari isu pariwisata. Kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Banyuwangi menghadapi tantangan dalam pengembangan pariwisata dari berbagai aspek yang terkait. Aspek yang termasuk ke dalam *state* dalam konteks pariwisata di Kabupaten Banyuwangi ini berkaitan dengan sebaran manfaat ekonomi pariwisata, kerentanan kelompok tertentu, serta kapasitas layanan publik di kawasan destinasi (Disbudpar Kab. Banyuwangi, 2025; Hariyoko, Biadi, *et al*., 2021). Riset pariwisata di

Banyuwangi dibutuhkan untuk memotret indikator *state* secara sistematis sebagai dasar perencanaan dan evaluasi, sehingga pemerintah dapat memastikan kualitas destinasi tetap terjaga, mengantisipasi penurunan daya dukung, serta merancang intervensi yang lebih presisi agar kemajuan pariwisata berlangsung inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, pariwisata dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan atraksi. Ketiga jenis wisata tersebut memiliki kondisi dan kebutuhan perlakuan yang berbeda-beda (Suriyankietkaew *et al*., 2025; Tomej & Bilynets, 2024). Proses pengembangan yang dilakukan saat ini juga telah mengarah pada keselarasan ketiga jenis wisata tersebut dengan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah
   a. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/202/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Banyuwangi.
   b. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/558/kep/429.011/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Desa Tematik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.
   c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi.
   d. Ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana penunjang riset dan inovasi di Banyuwangi diwujudkan melalui pembangunan lokasi percontohan di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
   e. Ketersediaan anggaran daerah untuk riset dan inovasi di Banyuwangi direalisasikan melalui alokasi APBD yang mendukung program penelitian, peningkatan kapasitas SDM, penyelenggaraan event inovasi, serta fasilitasi kolaborasi dengan perguruan tinggi.
   f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi
   g. Dinas Kebudayaan yang memfasilitasi penyelenggaraan seni budaya (jumlah kegiatan terukur IKU mencapai lebih dari 10 *event*)
   h. Anggaran yang berkaitan dengan riset dan inovasi dalam pariwisata budaya sudah ada, meskipun hanya untuk satu kegiatan riset.
   i. Belum terdapat regulasi khusus untuk pengembangan riset dan inovasi pariwisata buatan.
   j. Memiliki beberapa objek wisata buatan seperti Taman Sritanjung, Pantai Boom, Taman Gandrung Terakota, Selo Aji Water Park, dan Rembangan, namun belum ada fasilitas riset atau pusat inovasi terkait.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi
   a. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/869/kep/429.011/2024 tentang Tim Pengelola Inovasi. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di Banyuwangi dibangun melalui penguatan institusi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sistem informasi digital, disertai dukungan regulasi, jejaring kolaborasi, dan pendanaan berkelanjutan untuk memastikan hasil riset dapat diimplementasikan secara efektif bagi pembangunan daerah.
   b. Belum terbentuk tim kerja atau forum lintas sektor yang secara aktif menjalankan riset dan inovasi di sektor budaya dan buatan di tingkat daerah (Kab. Banyuwangi, 2025).

3. Kemitraan riset dan inovasi
   a. Kerja sama riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan sektor swasta, industri lokal, maupun perguruan tinggi selama ini dilaksanakan melalui pengembangan desa wisata, penerapan teknologi digital pariwisata, penguatan UMKM kreatif, pengolahan potensi kelautan dan pertanian secara inovatif, hingga penyelenggaraan festival dan konferensi bersama yang mendorong hilirisasi hasil riset untuk mendukung daya saing pariwisata dan ekonomi daerah (Kab. Banyuwangi, 2025).
   b. Kolaborasi riset budaya antara pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta belum terstruktur dan cenderung bersifat insidental.
   c. Saat ini kerja sama lebih bersifat operasional (pengelolaan wahana) dan belum berbasis riset atau inovasi bersama industri lokal seperti pengembang wahana air.

4. Budaya riset dan inovasi
   a. Budaya riset dan inovasi Banyuwangi terhadap perkembangan pariwisata diwujudkan dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan kreativitas lokal dalam pengelolaan destinasi, pengembangan produk wisata, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan konsep pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan tren global.
   b. Kegiatan promosi budaya difokuskan pada festival seperti "Seblang" dan "Gandrung Sewu", namun belum dikaitkan secara langsung dengan hasil riset dan inovasi.
   c. Pemanfaatan teknologi digital belum optimal dalam melakukan promosi wisata (Kab. Banyuwangi, 2025).

5. Keterpaduan riset dan inovasi di daerah
   a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengintegrasikan pariwisata dengan riset dan inovasi. Format acaranya berupa festival, konferensi, *hackathon*, pameran, dan expo. Lokasinya bisa direkomendasikan di destinasi wisata.
   b. Tidak ditemukan data adanya *event* khusus riset dan inovasi wisata buatan dan budaya, dan belum menjadi bagian terintegrasi dalam kalender tahunan pariwisata.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global
   a. Penyelarasan pariwisata Banyuwangi dengan perkembangan global pada pelaksanaan riset dan inovasi diwujudkan melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, digitalisasi destinasi, ekowisata bahari, pelestarian budaya, wisata kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim menuju *net zero tourism*.
   b. Implementasi riset budaya yang mengacu pada standar global seperti UNESCO *Intangible Cultural Heritage* masih belum terintegrasi dalam perencanaan daerah.
   c. Belum diterapkan sertifikasi standar global seperti ISO (*International Organization for Standardization)* atau standar BTMB wisata buatan (Kab. Banyuwangi, 2025).

Riset dan inovasi pariwisata buatan di Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi hambatan mendasar pada seluruh dimensi kunci tata kelola inovasi. Ketiadaan regulasi tematik menyebabkan arah pengembangan riset tidak memiliki pijakan yang jelas dan keterbatasan infrastruktur riset membuat proses perancangan, uji coba, dan standardisasi inovasi berjalan sporadis. Selain itu, kurangnya promosi digital berbasis teknologi imersif menurunkan kemampuan destinasi wisata buatan untuk membangun pengalaman, diferensiasi, dan daya saing pasar. Destinasi wisata buatan yang telah tumbuh, namun di sisi lain masih menghadapi rendahnya dukungan kelembagaan, anggaran, serta minimnya kolaborasi riset, menunjukkan bahwa perkembangan tersebut belum ditopang oleh ekosistem inovasi yang matang (DLH Kab. Banyuwangi, 2026).

Temuan ini menjadi dasar yang kuat untuk mendorong inovasi kebijakan dan perbaikan proses penerapannya oleh pemerintah daerah agar riset tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang terukur. Pemerintah perlu membangun kerangka kebijakan riset pariwisata buatan yang menata mandat, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta skema pendanaan dan kemitraan; sekaligus membentuk atau memperkuat kelembagaan penggerak riset dan inovasi daerah yang memastikan riset berjalan secara berkelanjutan. Dalam kerangka implementasi, penting untuk mengintegrasikan standar global berupa keselamatan wahana, kualitas layanan, dan keberlanjutan, serta mendorong *event* inovatif yang berfungsi sebagai ruang uji (*living lab*) untuk prototipe, teknologi pengalaman, dan model bisnis baru. Banyuwangi dapat memperkuat posisi wisata buatan tidak hanya sebagai pelengkap destinasi alam dan budaya, tetapi juga sebagai sektor kompetitif yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional (Bappeda Kab. Banyuwangi, 2025).

Agar kegiatan riset benar-benar dapat dilakukan dan dimanfaatkan pemerintah secara terukur, proses implementasi kebijakan perlu dirancang sebagai siklus *evidence-based policy* yang jelas, dimulai dari perencanaan riset, diseminasi, adopsi kebijakan/program, dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat menetapkan indikator kinerja yang menghubungkan *output* riset, seperti jumlah kajian, prototipe desain wahana, standar layanan, dan peta pasar, dengan *outcome* terukur berupa peningkatan kepuasan wisatawan, lama tinggal, dan belanja wisata; penurunan keluhan layanan; efisiensi pengelolaan sampah/energi; serta peningkatan keselamatan. Mekanisme *knowledge management* dapat dilakukan melalui repositori riset daerah, forum rutin pemerintah–akademisi–swasta, dan panduan adopsi hasil riset agar setiap temuan dapat diterjemahkan menjadi *Standard Operating Procedure* (SOP), regulasi teknis, atau program intervensi. Dengan pendekatan ini, riset yang dihasilkan oleh siapa pun mengenai pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi menjadi alat pengambilan keputusan yang memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola pariwisata buatan secara berkelanjutan (Kab. Banyuwangi, 2025).

4.4 *Impact*

Impact adalah dampak lanjutan terhadap kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, dan fungsi ekosistem, seperti peningkatan risiko penyakit, kerugian ekonomi, penurunan produktivitas, atau peningkatan kerentanan terhadap bencana. Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai daerah yang relatif maju dan terus mendorong pertumbuhan kunjungan yang termuat secara eksplisit sebagai Indikator Kinerja Utama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, *impact* menjadi pengantar penting untuk menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari ramainya destinasi atau bertambahnya *event* yang diagendakan setiap tahun, dengan target 85 kegiatan pada tahun 2026, meningkat dari 80 kegiatan pada tahun sebelumnya (DLH Kab. Banyuwangi, 2026), tetapi juga dari konsekuensi yang muncul bagi warga dan lingkungan. Ketika tekanan pariwisata tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat terlihat pada penurunan kualitas lingkungan, seperti sanitasi dan sampah yang ada di tempat wisata atau pada momen wisata (DLH Kab. Banyuwangi, 2025). Hal tersebut dapat menurunkan kualitas pengalaman wisata yang berujung pada kerugian ekonomi pelaku lokal hingga degradasi ekosistem yang melemahkan daya tarik destinasi dalam jangka panjang.

Pada wilayah dengan karakter alam yang kuat seperti Banyuwangi, dampak juga dapat berkaitan dengan peningkatan risiko keselamatan dan bencana yang pada akhirnya memengaruhi citra destinasi serta biaya penanganan pemerintah (Kab. Banyuwangi, 2025).

Riset pariwisata di Banyuwangi dibutuhkan untuk mengukur dan memetakan dampak berbasis data, sehingga pemerintah dapat merancang respons yang lebih tepat untuk menjaga kualitas hidup warga, melindungi ekosistem, dan memastikan pariwisata tetap menjadi motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Kab. Banyuwangi, 2025). Riset dapat digunakan untuk memberikan solusi dan mengembangkan penyelesaian masalah yang relevan dengan isu pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

Dampak lanjutan pariwisata tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, kesehatan, dan fungsi ekosistem. Dalam konteks Banyuwangi yang relatif sudah maju dan terus mendorong pertumbuhan kunjungan, perspektif *impact* penting untuk menempatkan keberhasilan pariwisata secara lebih komprehensif. Pariwisata dapat menghasilkan dampak ekonomi positif seperti peningkatan pendapatan UMKM, bertambahnya kesempatan kerja lokal, penguatan PAD/retribusi, serta potensi peningkatan lama tinggal wisatawan yang memperluas perputaran ekonomi (Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025). Investasi juga diperkirakan naik setiap tahunnya sekitar 26 miliar rupiah per tahun yang menyasar sektor pendukung pariwisata (DLH Kab. Banyuwangi, 2025). Manfaat ekonomi tersebut sering kali tidak merata secara otomatis apabila tidak ada tata kelola yang kuat. Pertumbuhan dapat memunculkan ketimpangan antarwilayah dan antaraktor, terutama jika aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada koridor tertentu atau didominasi oleh pelaku bermodal besar (Kab. Banyuwangi, 2025).

Tekanan pariwisata yang tidak terkelola dapat menurunkan kualitas lingkungan dan pengalaman wisata, sekaligus meningkatkan risiko sosial dan keselamatan seperti yang sudah dipetakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi (DLH Kab. Banyuwangi, 2025). Timbulan sampah, sanitasi yang tidak memadai, atau kepadatan berlebih dapat menurunkan kenyamanan, mengurangi kepuasan atau loyalitas wisatawan, dan pada akhirnya menurunkan pendapatan pelaku lokal karena citra destinasi melemah. Dampak lingkungan juga dapat berupa degradasi habitat dan penurunan daya dukung ekosistem pesisir, hutan, terumbu, dan kawasan konservasi yang justru menjadi basis daya tarik Banyuwangi dalam jangka panjang (Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025). Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya pemulihan dan mengurangi daya saing destinasi. Pada aspek sosial-budaya, ekspansi pariwisata berpotensi memicu konflik ruang, kenaikan harga lahan, serta perubahan budaya menuju komodifikasi yang dapat menggeser praktik lokal dan relasi antarkomunitas.

Pada wilayah dengan karakter wisata alam yang kuat, *impact* juga melekat pada risiko keselamatan berupa kecelakaan aktivitas alam, kepadatan jalur, dan cuaca ekstrem yang berimplikasi pada reputasi destinasi dan biaya penanganan pemerintah. Karena itu, riset pariwisata Banyuwangi perlu mengukur dan memetakan *impact* berbasis data agar respons kebijakan dapat lebih presisi dalam menjaga kualitas hidup warga, melindungi ekosistem, serta memastikan pertumbuhan pariwisata berlangsung inklusif dan berkelanjutan (Kab. Banyuwangi, 2025; Kurniawan *et al*., 2026).

4.5 *Response*

Response adalah tindakan intervensi berupa regulasi, insentif, penegakan, inovasi layanan, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan yang diarahkan untuk memutus rantai masalah pada satu atau beberapa komponen. Kabupaten Banyuwangi, yang sektor wisatanya sudah matang dan menjadi rujukan pengembangan destinasi, dapat digunakan untuk menegaskan bahwa kemajuan pariwisata membutuhkan tata kelola yang semakin presisi, adaptif, dan berbasis bukti. Pertumbuhan wisata memunculkan perubahan kondisi. Kapasitas pemerintah daerah tidak cukup hanya untuk mempromosikan dan menyelenggarakan *event*,

tetapi juga harus mampu merancang respons yang mengarahkan pertumbuhan agar tetap terkendali dan berkelanjutan.

Peran riset tentang pariwisata dapat membantu mengidentifikasi respons mana yang paling efektif untuk pengaturan daya dukung dan zonasi, penguatan sistem persampahan dan sanitasi, standar hijau bagi akomodasi, manajemen transportasi dan parkir, hingga skema bagi hasil yang lebih adil bagi komunitas lokal. Hasil dari riset yang kuat dapat digunakan untuk menjaga kualitas destinasi, meningkatkan akuntabilitas kebijakan, dan memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar menjawab akar masalah, bukan sekadar merespons gejala sesaat.

Tabel 4. Matriks Analisis DPSIR Riset Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

Elemen DPSIR	Konteks Spesifik Banyuwangi	Isu Riset Pengembangan Pariwisata	Aktor dan Sumber Data yang Lazim
Driver (Penggerak)	Citra Kabupaten Banyuwangi sebagai tujuan wisata yang sudah matang dan akan naik ke tingkat internasional	1. Peningkatan anggaran promosi/*event* 2. Pertumbuhan akomodasi & *homestay* 3. Pertumbuhan investasi pariwisata 4. Perubahan preferensi wisatawan (*experience-based tourism*)	Disbudpar, Bappeda, BPS, asosiasi pelaku usaha (PHRI/ASITA), desa/kelompok sadar wisata
Pressure (Tekanan)	Lonjakan kunjungan ke Kawah Ijen, Bangsring, Pulau Merah, serta *event* besar yang menimbulkan tekanan fisik–sosial	1. *Overcrowding* pada momen *high season* liburan 2. Kemacetan dan emisi menuju destinasi 3. Timbulan sampah di pantai/spot wisata 4. Peningkatan konsumsi air & energi hotel/restoran 5. Tekanan pada ekosistem pesisir pantai, terumbu karang, mangrove, hutan, dan 6. Alih fungsi lahan di kawasan dan lingkungan wisata 7. *Event pressure* seperti kerumunan, kebisingan, beban fasilitas publik	Disbudpar, Dishub, DLH, PDAM/PLN, pengelola kawasan Taman Nasional, BBKSDA, Perhutani, desa/pokdarwis, pelaku usaha
State (Kondisi)	Perubahan kondisi destinasi & kualitas layanan akibat perkembangan global	1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah 2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi 3. Kemitraan riset dan inovasi 4. Budaya riset dan inovasi 5. Keterpaduan riset dan inovasi di daerah 6. Penyelarasan dengan perkembangan global	DLH, pengelola kawasan wisata dan konservasi, Bappeda, Disbudpar, survei wisatawan, data pengaduan
Impact (Dampak)	Dampak ekonomi positif sering muncul bersamaan dengan risiko sosial-lingkungan dan ketimpangan manfaat	1. Peningkatan ekonomi: pendapatan UMKM, kerja lokal, PAD/retribusi, lama tinggal 2. Sosial: ketimpangan antarwilayah/aktor, konflik ruang, perubahan budaya (komodifikasi), kenaikan harga lahan 3. Lingkungan: degradasi habitat, penurunan daya dukung 4. Kualitas pengalaman: penurunan kepuasan/loyalitas bila *overcrowded*/kotor 5. Risiko keselamatan (kecelakaan aktivitas alam)	BPS, Disbudpar, Bapenda, survei rumah tangga/UMKM, wawancara komunitas, data kesehatan, data keamanan
Response (Respons)	Kebijakan & tata kelola untuk menyeimbangkan pertumbuhan wisata dengan keberlanjutan dan pemerataan	1. Penetapan *carrying capacity* dan manajemen kuota/slot waktu 2. Zonasi kawasan & penertiban bangunan 3. Penguatan sistem persampahan destinasi, seperti TPS3R, bank sampah, larangan plastik	Pemkab lintas OPD (Disbudpar–DLH–Dishub–Satpol PP), pengelola konservasi, pengelola wisata, pengelola penginapan, desa/pokdarwis,

Elemen DPSIR	Konteks Spesifik Banyuwangi	Isu Riset Pengembangan Pariwisata	Aktor dan Sumber Data yang Lazim
		4. Pengaturan transportasi & parkir; edukasi wisatawan 5. Penguatan CBT/desa wisata & skema bagi hasil 6. Monitoring rutin	pelaku usaha, komunitas, akademisi

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

5. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata Banyuwangi yang didorong oleh penguatan citra destinasi, penyelenggaraan berbagai *event*, peningkatan kapasitas akomodasi, masuknya investasi, serta perubahan preferensi wisatawan telah menjadi *driver* yang mampu meningkatkan aktivitas dan daya saing sektor pariwisata. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tekanan pada destinasi unggulan seperti Kawah Ijen, Bangsring Underwater, dan Pantai Pulau Merah, antara lain berupa *overcrowding* pada musim liburan, kemacetan lalu lintas, peningkatan emisi, serta meningkatnya timbulan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata tidak dapat diukur hanya dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan destinasi dalam menjaga kualitas lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Dalam perspektif DPSIR, tekanan tersebut perlu dipahami melalui penelitian yang mampu menggambarkan *state* destinasi secara komprehensif. Penelitian tidak hanya berfungsi untuk mengukur kondisi fisik, seperti kebersihan, sanitasi, daya dukung kawasan, dan kualitas layanan, tetapi juga untuk mengevaluasi kapasitas kebijakan, kelembagaan, kemitraan, pelestarian budaya, serta ekosistem riset dan inovasi. Meskipun Banyuwangi telah menunjukkan perkembangan yang baik pada berbagai indikator pembangunan pariwisata, masih terdapat kesenjangan dalam aspek riset dan inovasi, khususnya dalam pengembangan wisata buatan dan wisata budaya. Kesenjangan tersebut mengakibatkan pengambilan keputusan sering kali belum sepenuhnya didasarkan pada bukti empiris yang mencerminkan kondisi aktual destinasi.

Apabila kondisi tersebut tidak didukung oleh hasil penelitian yang memadai, maka *impact* pengembangan pariwisata berpotensi bergeser dari manfaat ekonomi, seperti meningkatnya pendapatan UMKM, terbukanya lapangan kerja, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatnya lama tinggal wisatawan menjadi berbagai konsekuensi negatif berupa ketimpangan ekonomi, konflik pemanfaatan ruang, komodifikasi budaya, degradasi lingkungan, menurunnya kepuasan wisatawan, hingga meningkatnya risiko keselamatan. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diposisikan sebagai landasan utama dalam merancang *responses* atau kebijakan pengembangan pariwisata. Bukti empiris yang dihasilkan penelitian dapat dimanfaatkan untuk menetapkan daya dukung destinasi, menyusun zonasi wisata, memperkuat sistem pengelolaan persampahan, menerapkan standar pariwisata hijau, mengembangkan manajemen transportasi, serta menyusun indikator kinerja yang memungkinkan setiap kebijakan dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada produksi pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pengembangan pariwisata Banyuwangi yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis bukti (*evidence-based tourism development*).

DAFTAR PUSTAKA

Afedor, D., Amankwah, E., & Takase, M. (2024). Application of DPSIR model to ascertain driving forces and their impacts on the Volta basin. *Heliyon*, *10*(19). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38734

Alketbi, S., & Gardiner, P. (2014). Top-down management approach in project portfolio management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *119*, 611–614. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.068

Azizah, Saleh, A. R., & Rahayu, S. (2022). Peta jalan penelitian lobster di Indonesia berdasarkan artikel jurnal ilmiah dan prosiding. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, *21*. https://doi.org/10.29244/jpi.21.2.109-123

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2024, May 30). *Tingkat penghunian kamar hotel bulanan (persen), 2019-2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*. https://banyuwangikab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzA1IzE=/tingkat-penghunian-kamar-hotel-bulanan---persen----2019-2024.html

Bappeda Kab. Banyuwangi. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 2024*.

Breuer, J., Walravens, N., & Ballon, P. (2014). Beyond defining the smart city. Meeting top-down and bottom-up approaches in the middle. *Journal of Land Use, Mobility and Environment*, *4*(6), 153–164. https://doi.org/10.6092/1970-9870/2475

Disbudpar Kab. Banyuwangi. (2025). *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029*.

DLH Kab. Banyuwangi. (2025). *Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029*.

DLH Kab. Banyuwangi. (2026). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLH Kabupaten Banyuwangi 2025*.

DLH Kab. Banyuwangi. (2026, February 28). *Kalender event Banyuwangi 2026*. https://www.instagram.com/p/DVSxJ13kZLb/

Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2001). A stakeholder approach to strategic management. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.263511

Gari, S. R., Ortiz Guerrero, C. E., A-Uribe, B., Icely, J. D., & Newton, A. (2018). A DPSIR analysis of water uses and related water quality issues in the Colombian Alto and Medio Dagua Community Council. *Water Science*, *32*(2), 318–337. https://doi.org/10.1016/j.wsj.2018.06.001

Girindra, I. A. G. (2020). Sendang Biru *tourism* penciptaan *value creation* sebagai optimalisasi pengembangan potensi wisata bahari berbasis penta helix model. *Jurnal Widya Publika*, *8*(2), 142–162. https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.646

Gnanapragasam, K., Ratnasiri, S., & Fleming, C. (2026). Sustainable small-scale fisheries development: Integrating bioeconomic and DPSIR models for policy insights. *Marine Policy*, *189*. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2026.107095

Goktepe, S., Cetin, G., Antonovica, A., & Curiel, J. de E. (2024). The impact of government legitimacy on the tourism industry during crises. *European Research on Management and Business Economics*, *30*(3), 100259. https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2024.100259

Grote, K. M. (2024). Indigenous peoples and the power(lessness) of public participation: Assessing effects of Indigenous community input in the Alaskan Coastal Plain oil and gas leasing program environmental impact statement. *Environmental Science and Policy*, *158*. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103787

Hariyanto, F. (2023, March 24). *Aib Banyuwangi yang masih menghantui*. Mojok.Co. https://mojok.co/terminal/aib-banyuwangi-yang-masih-menghantui/

Hariyoko, Y., Biadi, E. P., & Susiantoro, A. (2021). Pengembangan objek wisata Kabupaten Mojokerto dengan pendekatan collaborative governance (Studi kasus pemandian air panas Pacet). *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, *11*(1). https://doi.org/10.38156/gjkmp.v11i1.80

Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., & Pangestuti, R. P. (2021). Evaluasi kebijakan pembangunan wisata religi di Kabupaten Gresik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, *13*(1), 44–51. https://doi.org/10.15575/jpan.v13i1.11745

Haryanto, T., Rahmawati, Y., Kusumawardani, D., Martina, A., Ichsan, A. K. N., Erlando, A., & Ibrahim, K. H. (2025). Balancing economic returns and conservation: A bioeconomic assessment of Sardinella lemuru fisheries management in Muncar, Banyuwangi, Indonesia. *Social Sciences and Humanities Open*, *11*. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101277

Hentika, N. P., & Agustina, E. (2024). Tourism marketing: Banyuwangi Regency Government partnership with local mass media in Banyuwangi. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, *8*(1). https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3597

Humas KSDES. (2025). *Wisatawan membludak, sampah menggunung, ini yang dilakukan petugas di Kawah Ijen*. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. https://ksdae.kehutanan.go.id/publikasi/berita/wisatawan-membludak-sampah-menggunung-ini-yang-dilakukan-petugas-di-kawah-ijen-VkeWJAut/

Kab. Banyuwangi. (2025). *Eksum RIPJPID Kabupaten Banyuwangi*.

Kabupaten Banyuwangi. (n.d.-a). *PAD Sektor Pariwisata*. Retrieved January 8, 2026, from https://satudata.banyuwangikab.go.id/dataset/detail/903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3

Kabupaten Banyuwangi. (n.d.-b). *Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun*. Retrieved January 8, 2026, from https://satudata.banyuwangikab.go.id/dataset/detail/7a674153c63cff1ad7f0e261c369ab2c

Kastenholz, E., Eusébio, C., & Carneiro, M. J. (2018). Segmenting the rural tourist market by sustainable travel behaviour: Insights from village visitors in Portugal. *Journal of Destination Marketing & Management*, *10*, 132–142. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.09.001

Kurniawan, I., Fitriani, L., Asri, M. D., & Priatna, R. (2026). Strategi pengembangan desa wisata melalui pendekatan analisis SWOT: Studi kasus Tugu Utara, Kabupaten Bogor. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, *29*(1), 1-20. https://doi.org/10.31845/jwk.v29i1.1023

Liang, L. J., Choi, H. C., Dupej, S., & Zolfaghari, A. (2023). Motivations, risks, and constraints: An analysis of affective and cognitive images for cannabis tourism in Canada. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, *4*(2). https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100110

Lidiawaty, B. R., Nasution, A. H., Putra, A. R., & Tjahyanto, A. (2024). Design science research for developing risk tourism mapping based on visitor sentiment review. *Procedia Computer Science*, *234*, 1672–1680. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.172

Liu, L., Li, J., Wang, J., Liu, F., Cole, J., Sha, J., Jiao, Y., & Zhou, J. (2022). The establishment of an eco-environmental evaluation model for southwest China and eastern South Africa based on the DPSIR framework. *Ecological Indicators*, *145*. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109687

McKercher, B., & Tkaczynski, A. (2024). Does the destination matter in domestic tourism? *Annals of Tourism Research*, *108*. https://doi.org/10.1016/j.annals.2024.103817

Muzaqi, A. H., Tyasotyaningrum, B., & Wardhani, T. T. (2024). Proses collaborative governance pada pariwisata Banyu Biru, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Wacana Kinerja:*

Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, *27*(1), 1. https://doi.org/10.31845/jwk.v27i1.852

Norris, D. F. (2007). *Current issues and trends in e-government research*. CyberTech Publishing.

Nurizwan, S., & Dewi, U. (2018). Dynamic governance dalam pengembangan pariwisata di kawasan resort pengelolaan hutan Mangunan Kabupaten Bantul. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, *6*(2), 209–220. https://doi.org/10.21831/jnp.v6i2.24253

Parastowo, R. A. F. (2025). Analisis penyusunan *policy paper* dalam penguatan strategi kebijakan pengembangan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Timur. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(3). https://doi.org/10.31604/jips.v12i3.2025.1269-1279

Pradana, I., Prasaningtyas, A., & Ariyaningsih. (2023). Analisis DPSIR untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengembangan Kawasan Industri Kariangau. *Ruang*, *9*(1). https://doi.org/10.14710/ruang.9.1.24-33

Quevedo, J. M. D., Lukman, K. M., Ulumuddin, Y. I., Uchiyama, Y., & Kohsaka, R. (2023). Applying the DPSIR framework to qualitatively assess the globally important mangrove ecosystems of Indonesia: A review towards evidence-based policymaking approaches. *Marine Policy*, *147*. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105354

Resen, M. G. S. K. (2015). Inovasi daerah (Refleksi dan pengaturan inovasi daerah di Indonesia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *4*(4). https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p07

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 652–667. http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=6fe4bf62-4786-4cd7-91a7-8eab63719860%40sessionmgr104

Sampath, D. M. R., Freitas, J. G., & Dias, J. A. (2022). Extending the DPSIR framework to analyse Driver-Pressure-State-Impact-Response of sand dune management in Manawatu-Whanganui (New Zealand) since the 19th century. *Ocean and Coastal Management*, *230*. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106348

Saraswati, A. W. (2022). *Sampah plastik kiriman terdampar di pantai-pantai Banyuwangi - EcoRanger Indonesia*. EcoRanger Indonesia. https://ecoranger.id/?sustain-travel=sampah-plastik-kiriman-terdampar-di-pantai-pantai-banyuwangi

Soekarya, T. (2011). Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan desa wisata. In *Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata*.

Stoker, G. (1998). *Governance as theory: Five propositions*. https://kostasantlavdas.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/02/00-stoker-governance1.pdf

Supriyanto & Fitria, N. J. L. (2022). Modal sosial dan potensi wisata dalam pengembangan kompleks pariwisata pelabuhan Kota Probolinggo berbasis masyarakat. *Entita*, *4*(2). https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i2.6982

Suprojo, A., & Siswanto, B. (2017). Pembangunan Kota Wisata Batu dalam perspektif sosial dan ekonomi masyarakat (Suatu kajian perspektif perubahan sosial dan ekonomi). *Reformasi*, *7*(1), 78–87. https://doi.org/10.33366/rfr.v7i1.699

Suriyankietkaew, S., Krittayaruangroj, K., Thinthan, S., & Lumlongrut, S. (2025). Creative tourism as a driver for sustainable development: A model for advancing SDGs through community-based tourism and environmental stewardship. *Environmental and Sustainability Indicators*, *27*. https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100828

Tomej, K., & Bilynets, I. (2024). Large-scale tourism transformations through regeneration: A living systems perspective on tourism developments in Ukraine during the war. *Annals of Tourism Research*, *109*. https://doi.org/10.1016/j.annals.2024.103856

Vani, R. V., Priscilia, S. O., & Adianto, A. (2020). Model pentahelix dalam mengembangkan potensi wisata di Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *8*(1), 63–70. https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3361

Wider, W., Gao, Y., Chan, C. K., Lin, J., Li, J., Tanucan, J. C. M., & Fauzi, M. A. (2023). Unveiling trends in digital tourism research: A bibliometric analysis of co-citation and co-word analysis. *Environmental and Sustainability Indicators*, *20*. https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100308

Wiraguna, S. A. W. (2024). Kajian lokasi untuk oceanarium di Surabaya: Keseimbangan antara wisata, pendidikan dan riset. *Jurnal Anala*, *12*(1). https://doi.org/10.46650/anala.12.1.1508.35-45

Woodly, D. (2008). New competencies in democratic communication? Blogs, agenda setting and political participation. *Public Choice*, *134*(1–2), 109–123. https://doi.org/10.1007/s11127-007-9204-7